

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asia Timur dan Pasifik adalah rumah bagi 43,1 juta anak penyandang disabilitas kedua setelah Asia Selatan dengan 64,4 juta anak penyandang disabilitas. Di Indonesia, perkiraan persentase dan jumlah anak penyandang disabilitas tampaknya belum menggambarkan situasi yang sebenarnya jika dibandingkan dengan situasi pada level regional dan global. Analisis yang dilakukan oleh Unicef pada Februari 2023 menemukan bahwa, meskipun kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan untuk melindungi hak anak penyandang disabilitas agar mendapatkan manfaat dari layanan sosial, namun mereka masih mengalami ketidaksetaraan dibandingkan dengan anak-anak non disabilitas dalam hal akses dan pemanfaatan layanan sosial.

Pemerintah daerah yang bergerak sebagai perangkat regulasi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Hal ini merupakan bagian dari usaha untuk melaksanakan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Upaya kesejahteraan sosial ini tidak hanya dilakkan oleh pemerintah, namun masyarakat juga memiliki peran didalamnya. Hal ini diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tetang kesejahteraan sosial pada pasal 1 disebutkan bahwa “penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

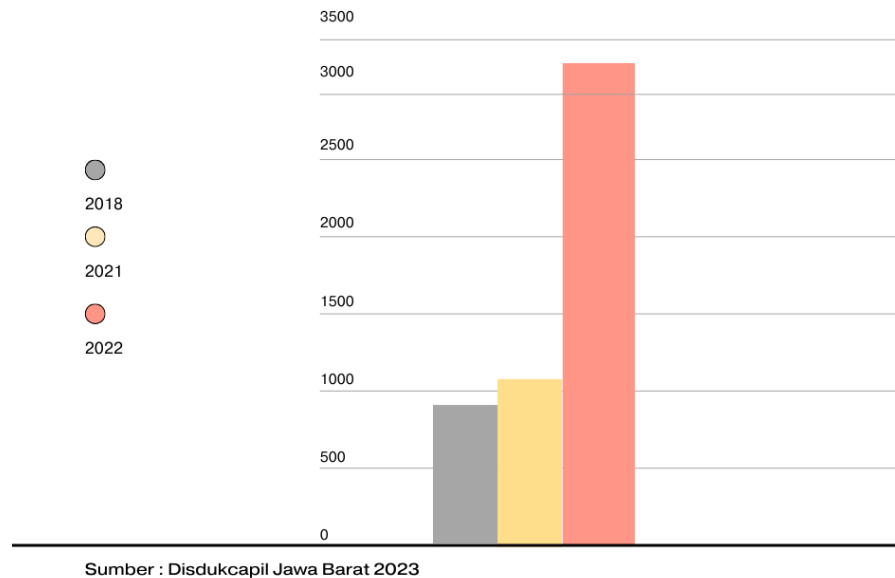
Regulasi lain yang mengatur adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 2 disebutkan bahwasannya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan

kepada perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Merujuk pada data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 25,5 juta orang. Lalu menurut Survey Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat ada sekitar 0,79 persen atau 650 ribu anak penyandang disabilitas dari jumlah 84,4 juta anak Indonesia pada tahun 2020 (KEMENPPPA, 2021). Sampai 30 Maret 2021, tercatat ada 110 anak penyandang disabilitas dari total keseluruhan 1.355 anak yang mengalami kekerasan (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, 2021). Diketahui bahwa hasil Susenas BPS pada tahun 2019 juga menunjukkan ada sekitar 13,5% anak disabilitas belum pernah sekolah dan 9,58% tidak lagi bersekolah.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), menunjukkan sepanjang tahun 2021 telah terjadi 987 kasus kekerasan yang terjadi pada anak disabilitas. 264 kasus dialami oleh anak laki-laki dan 764 lainnya merupakan kasus yang terjadi pada anak perempuan. Data yang sama juga mengungkapkan bahwa jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kasus kekerasan seksual yang memiliki 591 korban.

Berdasarkan data dari Disdukcapil di Jawa Barat, pada tahun 2021 terdapat sekitar 35.953 penyandang disabilitas dan bertambah menjadi 72.565 jiwa pada tahun 2022. Kabupaten Garut menjadi daerah dengan jumlah anak disabilitas urutan ke-7 terbanyak se Jawa Barat dari jumlah 27 Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat.



Gambar 1.1 Laporan Jumlah Anak Disabilitas Kabupaten Garut Tahun 2018,2021-2022

Diagram gambar tersebut menggambarkan bahwa di Kabupaten Garut sendiri penyandang disabilitas seperti Disabilitas Fisik, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Disabilitas Mental, Disabilitas Fisik dan Mental, dan Disabilitas lainnya setiap tahunnya mengalami kenaikan. Data yang diambil dari Disdukcapil Jawa Barat ini tidak menunjukkan data pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan efek dari pandemi yang membuat terhambatnya pendataan pada tahun tersebut. Pada tahun 2018 terdapat 895 penyandang disabilitas, pada tahun 2021 bertambah menjadi 1.089 orang dan melonjak pada tahun 2022 menjadi 3.339 orang. Melihat data penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitasannya di Kabupaten Garut yang semakin bertambah terutama di tahun 2022 yang sangat terlihat lonjakannya.

Hal diatas sejalan dengan pernyataan dari Bapak Drs. Dadang Bunyamin sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Garut yang mengemukakan bahwa bertambah banyaknya jumlah anak disabilitas ini membuat Dinas Sosial terkadang kewalahan dalam memberikan pelayanan

kepada para anak disabilitas yang dikarenakan SDM dari Bidang Rehabilitasi Sosial sendiri yang kurang memadai dari segi jumlah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan Bidang yang menanggungjawab program Rehabilitasi Sosial sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial pasal 12 nomor 3 tentang uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial poin 1 ”melaksanakan fasilitas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas meliputi fisik, intelektual, mental, dan ganda atau multi” . Oleh karena itu, dibutuhkan suatu program pelayanan dan rehabilitasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial membuat suatu program yang bernama ”Rehabilitasi Berbasis Masyarakat” sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi ini yang mana RBM ini merupakan suatu program pembinaan suatu wilayah yang dimaksudkan untuk mencegah kedisabilitas, mendeteksi dan merehabilitasi segala aspek kehidupan untuk meningkatkan integrasi sosial juga memberdayakan aspek kehidupan dari penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat. (Novianti, 2017)

Masyarakat akan banyak dilibatkan dalam usaha pencegahan, penyuluhan, rehabilitasi sosial, resosialisasi, dan pembinaan lanjutan. Berdasarkan pedoman program RBM, Rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) ini adalah rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam keluarga para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau masyarakatnya yang bertujuan merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berperan aktif secara optimal dalam upaya kesejahteraan sosial dengan menggunakan sumberdaya dan potensi masyarakat dengan koordinasi dan atau kerjasama antara swasta/partisipasi masyarakat dan atau pemerintah.

Program RBM ini dilaksanakan oleh kader-kader yang ada di lingkungan masyarakat dan juga masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas. Program kerja RBM bukan hanya dimaksudkan kepada para penyandang disabilitas, namun juga kepada masyarakat atau lingkungan sosial penyandang disabilitas. Kader RBM bertugas memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat lebih menerima keberadaan orang dan anak dengan kedisabilitasannya. Selain itu, kader-kader RBM juga mengajak masyarakat agar dapat berkontribusi dengan aktif dalam menjalankan program-program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat.

Rehabilitasi ini mencakup rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan juga rehabilitasi keterampilan. Peran masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program RBM ini karena program ini memang ditujukan dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Dukungan dari masyarakat dapat berupa perhatian, semangat, atau bantuan berupa transportasi atau pemberian kebutuhan sehari-hari. Masyarakat juga berperan dalam proses reintegrasi penyandang disabilitas kedalam masyarakat dengan mengurangi stigmatisasi dan mendukung penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat ini akan lebih besar peluang keberhasilan juga keberlanjutan program rehabilitasi.

Adanya RBM ini juga erat hubungannya dengan pembentukan hubungan sosial anak dengan kedisabilitasannya. Mereka mulai diperkenalkan

dengan lingkungannya seperti dengan tetangga, teman sebaya, dan lain sebagainya. Penerimaan masyarakat pun sangat penting sehingga anak-anak disabilitas dapat mempunyai hubungan sosial yang baik. Kinerja para kader RBM dalam mengimplementasikan program-programnya begitu berpengaruh terhadap kesejahteraan anak-anak penyandang disabilitas. Kinerja merupakan suatu hasil yang didapat seseorang dalam melaksanakan tugas yang harus dia lakukan yang didasarkan atas pengalaman, kecakapan, keseriusan, dan waktu. (Hasibuan, 2007).

Desa Ngamplang merupakan salah satu desa di Kabupaten Garut yang memiliki RBM dan juga dijadikan proyek percontohan pengadaan Program Peningkatan Kesejahteraan Anak Disabilitas melalui IDEAL (Inclusive Community Development and School for All) oleh Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak (SEMAK) sejak bulan September tahun 2016 sampai Agustus 2018. Untuk memberikan layanan kepada Anak dengan Disabilitas (AdD) di desa, pemerintah Desa Ngamplang meresmikan kepengurusan RBM melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ngamplang No : 147/Kep/II/2017 pada Februari 2017. RBM Desa Ngamplang merupakan bagian dari Dinas Sosial Kabupaten Garut yang termasuk kedalam Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) yang berkedudukan di Desa atau Kelurahan dan memiliki peran besar dalam penanganan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

Tabel 1.1 Permasalahan Di Desa Ngamplang Tahun 2024

No	Jenis Permasalahan	Jumlah Terdampak
1	Stunting	9
2	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	12
3	Kematian Bayi	3
4	Anak Dengan Kedisabilitasan	25

Sumber : Informan 4

Selain anak dengan kedisabilitas, Desa Ngamplang juga mempunyai beberapa permasalahan lainnya yang masih dalam penanganan sampai saat ini. Permasalahan tersebut diantaranya permasalahan stunting yang dalam kurun waktu satu tahun ini memiliki angka 9 anak terdampak stunting, kematian bayi sebanyak 3 orang, dan juga ibu hamil kekurangan energi kronis sebanyak 12 orang yang sampai saat ini permasalahan-permasalahan tersebut masih diusahakan rehabilitasinya.

Sejak 2016-2023 program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat ini sudah diimplementasikan di Desa Ngamplang dan terdapat 25 Anak dengan Disabilitas didalamnya. Hal ini menjadi suatu tantangan untuk pemerintah setempat juga masyarakat untuk sama-sama memberikan hak-hak untuk para anak disabilitas. Maka dari itu peran RBM sangat dibutuhkan di Desa Ngamplang untuk menjamin kesejahteraan bagi keberlangsungan hidup Anak Disabilitas di Kota Garut khususnya di Desa Ngamplang. Berdasarkan masalah tersebut, maka Peneliti akan mengkaji mengenai **Pelaksanaan Program Komunitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan Untuk Anak Disabilitas Di Desa Ngamplang Kabupaten Garut.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, peneliti membatasi permasalahan yang ada agar penelitian bisa lebih terorientasi dan terarah sesuai dengan batasan. Adapun permasalahan yang peneliti temukan adalah kurangnya SDM yang ada di Dinas Sosial untuk menjalankan Program Rehabilitasi Sosial.

C. Rumusan Masalah

Mengikuti pada latar belakang dan penjelasan mengenai identifikasi masalah. Dengan itu rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Standar dan Sasaran Program Komunitas Rehabilitas Berbasis Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan Untuk Anak Disabilitas Di Desa Ngamplang Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Sumber Daya program rehabilitasi berbasis masyarakat dalam memberikan pelayanan untuk anak disabilitas di Desa Ngamplang Kabupaten Garut?
3. Bagaimana Hubungan Antar Organisasi pada komunitas rehabilitasi berbasis masyarakat Desa Ngamplang Kabupaten Garut?
4. Bagaimana Karakteristik Agen Pelaksana pada rehabilitasi berbasis masyarakat Desa Ngamplang dengan organisasi lain yang ada di bidangnya?
5. Bagaimana Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik yang ada di komunitas rehabilitasi berbasis masyarakat ini?
6. Bagaimana Disposisi Implementor yang ada di RBM Desa Ngamplang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diharapkan bisa mencapai tujuan-tujuan dibawah ini :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Standar Dan Sasaran Program Komunitas Rehabilitas Berbasis Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan Untuk Anak Disabilitas Di Desa Ngamplang Kabupaten Garut?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Sumber Daya program rehabilitasi berbasis masyarakat dalam memberikan pelayanan untuk anak disabilitas di Desa Ngamplang Kabupaten Garut?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Hubungan Antar Organisasi pada komunitas rehabilitasi berbasis masyarakat Desa Ngamplang Kabupaten Garut?
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Karakteristik Agen Pelaksana pada rehabilitasi berbasis masyarakat Desa Ngamplang dengan organisasi lain yang ada di bidangnya?

5. Untuk Mengetahui Bagaimana Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik yang ada di komunitas rehabilitasi berbasis masyarakat ini?
6. Untuk Mengetahui Bagaimana Disposisi Implementor yang ada di RBM Desa Ngamplang?

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi manfaat untuk berbagai elemen yang ada di masyarakat. Berikut manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis
 - 1) Pemahaman Lebih Mendalam tentang Proses Rehabilitasi. Penelitian dapat membantu menguraikan proses rehabilitasi berbasis masyarakat secara lebih mendalam. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana interaksi antara individu, keluarga, lembaga pelayanan, dan masyarakat secara keseluruhan berkontribusi terhadap keberhasilan rehabilitasi.
 - 2) Penelitian dapat memberikan dasar untuk pengembangan teori praktis yang dapat membimbing para praktisi dalam merancang dan mengimplementasikan program rehabilitasi berbasis masyarakat yang efektif.
 - 3) Penelitian dapat membantu memahami bagaimana lingkungan sosial dapat mendukung atau menghambat partisipasi penuh anak disabilitas dalam masyarakat.
 - 4) Penelitian dapat membantu mengembangkan teori pemberdayaan anak disabilitas dan keluarganya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana memberikan kekuatan pada individu dan keluarga untuk mengambil peran aktif dalam proses rehabilitasi.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi peneliti maupun bagi mahasiswa

lainnya yang juga akan membahas mengenai peran Rehabilitasi Berbasis Masyarakat ataupun mengenai pelayanan terhadap Anak Disabilitas.

b. Bagi Pemerintah

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat. Informasi ini dapat digunakan oleh penyedia layanan untuk meningkatkan pendekatan mereka terhadap anak disabilitas, termasuk pengembangan program yang lebih efektif dan responsif.
2. Penyempurnaan Program Rehabilitasi: Penelitian dapat membantu menyempurnakan program-program rehabilitasi yang ada. Hasil penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kebutuhan individu anak disabilitas, memungkinkan penyempurnaan dalam desain program rehabilitasi untuk mencocokkan kebutuhan khusus mereka.
3. Optimalisasi Sumber Daya: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas metode rehabilitasi berbasis masyarakat, organisasi dan lembaga pelayanan dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien. Ini termasuk pengelolaan dana, tenaga kerja, dan fasilitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak disabilitas.

c. Bagi Masyarakat Umum

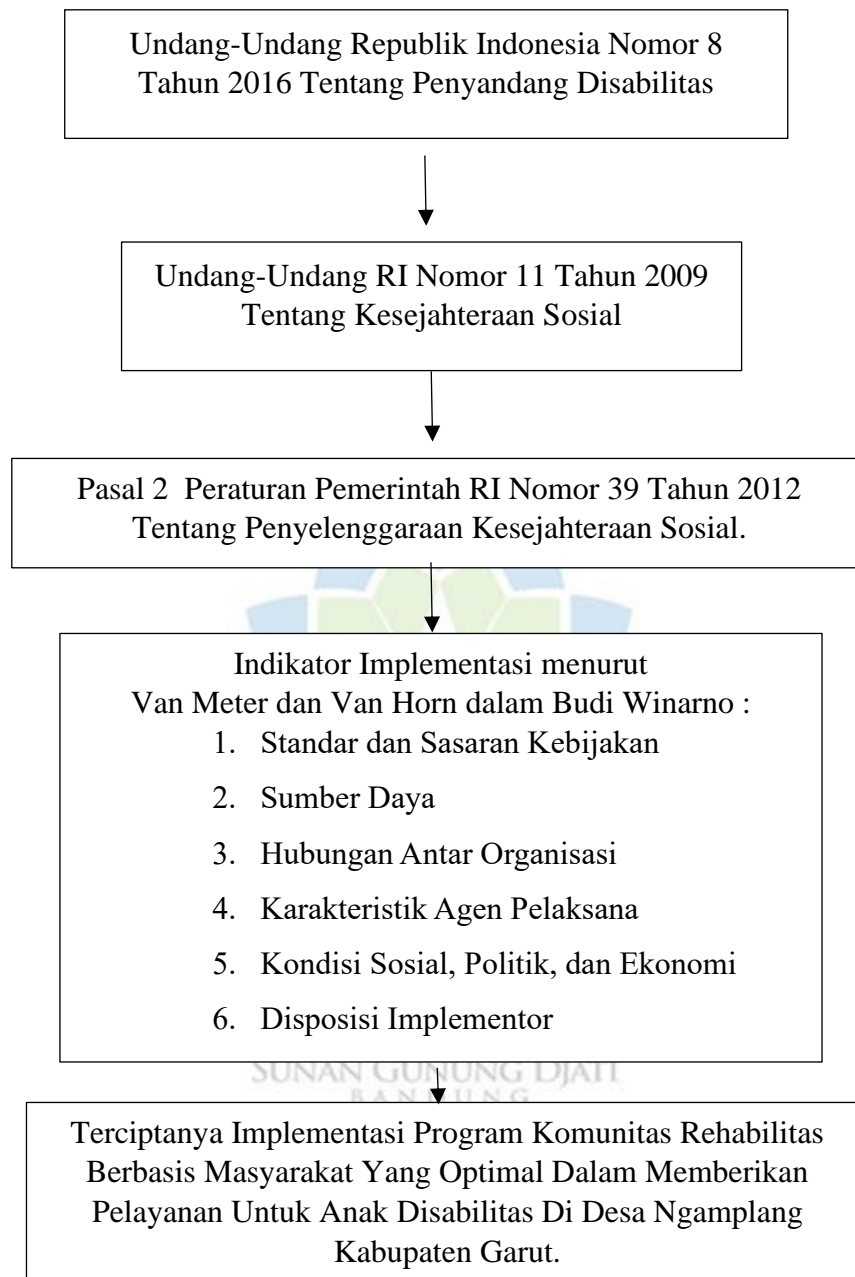
1. Penelitian dapat memberikan informasi yang berguna kepada keluarga anak disabilitas. Keluarga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara terbaik mendukung anak mereka dalam proses rehabilitasi. Ini dapat mencakup strategi pemberdayaan keluarga dan dukungan psikososial.
2. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran rehabilitasi berbasis masyarakat, penelitian ini dapat membantu

mengarah pada inisiatif-inisiatif yang meningkatkan inklusivitas sosial anak disabilitas. Hal ini dapat melibatkan pendidikan masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan anak disabilitas.

F. Kerangka Pemikiran

Kajian ini merupakan kajian tentang Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Upaya memberikan pelayanan dan rehabilitasi yang dapat menunjang seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu peneliti akan mengkaji program Rehabilitasi Sosial ini berjalan.





Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti, 2023